

ABSTRAK

Banjir merupakan bencana alam yang sering terjadi di Kabupaten Sampang, bahkan menjadi bencana yang sering terjadi hampir setiap tahun ketika sudah memasuki musim hujan. Permasalahan banjir yang terjadi di Kabupaten Sampang pada setiap tahun sepanjang musim hujan merupakan suatu kegagalan Pemerintah dikarenakan tidak sanggup dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan banjir. Pemerintah Daerah melalui BPBD melakukan berbagai cara dalam rangka penanggulangan bencana banjir. Yang merupakan pihak yang memegang tanggung jawab penuh didalam pelaksanaan manajemen penanggulangan bencana. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang terdapat dalam Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana daerah.

Bentuk Pertanggung Jawaban BPBD dalam Penanggulangan bencana khususnya banjir di Kabupaten sampang masih kurang maksimal karena tidak secara spesifik dalam Perda tersebut mengatur tentang pelaksanaan sesuai dengan keadaan wilayah dan potensi bencana khususnya banjir di kabupaten Sampang sehingga masih menggunakan aturan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Pendekatan dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, interview dan dokumentasi. Metode analisis data menggunakan teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Implementasi tugas dan kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Penanggulangan bencana banjir di kabupaten sampang berdasarkan Perda Kabupaten Sampang No.4 Tahun 2010 belum sepenuhnya terpenuhi dan Pemerintah setempat belum melakukan pembahasan lebih lanjut terkait Penyelenggaraan penanggulangan bencana. dalam menanggulangi bencana banjir sudah terlaksana dengan cukup baik, namun belum menunjukkan hasil yang optimal karena masih mengalami beberapa kendala yang dihadapi oleh BPBD Kabupaten Sampang dengan adanya

faktor sumber daya manusia (SDM) dan keterampilan (skill) dengan melihat cakupan wilayah banjir di Kabupaten Sampang sangat luas, Sarana dan Prasarana yang dimiliki masih kurang dan membuat kinerja menjadi tidak efisien, serta kurangnya pendanaan yang mampu menghambat kinerja dari organisasi tersebut dalam mencapai tujuan.

Berdasarkan Pertanggung jawaban Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang dalam penanggulangan bencana banjir dapat dikategorikan kurang maksimal dalam mencapai Tanggung jawab yang cukup baik. Hal ini didasarkan pada hasil pengukuran pada masing-masing Pertanggung jawaban. Indikator yang menunjukkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang telah berusaha mengenali kebutuhan Masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya BPBD masih mengalami berbagai kendala dan masih belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu BPBD Kabupaten Sampang lebih meningkatkan Pelayanan informasi serta akses terhadap masyarakat tentang edukasi bencana, perlunya regenerasi operasional, keterlibatan Pemerintah serta masyarakat. sehingga Penanganan bencana banjir dapat dilakukan dengan cepat dan meningkatkan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang memadai. hal ini dimaksudkan agar meminimalisir penanggulangan bencana banjir yang sering terjadi di kabupaten sampang.

Kata Kunci : Penanggulangan bencana banjir, Pertanggung Jawaban, Badan Penanggulangan Bencana Daerah

ABSTRACT

Floods are natural disasters that often occur in Sampang Regency, and even become disasters that often occur almost every year when it enters the rainy season. The problem of flooding that occurs in Sampang Regency every year during the rainy season is a failure of the Government because it is unable to deal with and solve flood problems. The Regional Government through the BPBD has carried out various methods in the context of flood disaster management. Which is the party that holds full responsibility in the implementation of disaster management. Based on Government Regulation No. 21 of 2008 concerning the Organization of Disaster Management contained in the Organizational Structure of the Regional Disaster Management Agency.

The form of BPBD accountability in disaster management, especially floods in Sampang Regency, is still not optimal because the Perda does not specifically regulate implementation in accordance with regional conditions and potential disasters, especially floods in Sampang Regency, so it still uses the rules of Law Number 24 of 2007. The type of research in this research is a type of empirical legal research. The approach in this study is a qualitative research. Data collection techniques include observation, interviews and documentation. Methods of data analysis using data analysis techniques in the form of data reduction, data presentation and drawing conclusions.

The results of the discussion show that the implementation of the duties and authorities of the Regional Disaster Management Agency in managing floods in Sampang district based on the Regional Regulation of Sampang Regency No.4 of 2010 has not been fully fulfilled and the local government has not conducted further discussions regarding the implementation of disaster management. in tackling the flood disaster it has been carried out quite well, but has not shown optimal results because it is still experiencing several obstacles faced by BPBD Sampang Regency with the presence of human resources (HR) and skills (skills) by seeing the coverage of flood areas in Sampang Regency is very wide, the facilities and infrastructure owned are still lacking and make performance inefficient, and the lack of funding that can hinder the performance of the

organization in achieving its goals.

Based on the Accountability of the Sampang Regency Regional Disaster Management Agency in flood disaster management, it can be categorized as less than optimal in achieving good enough responsibility. This is based on the measurement results for each Accountability. Indicators show that the Regional Disaster Management Agency of Sampang Regency has tried to recognize the needs of the community. However, in practice BPBD is still experiencing various obstacles and is still not running optimally. Therefore BPBD Sampang Regency is further improving information services and access to the community about disaster education, the need for operational regeneration, government and community involvement. so that flood disaster management can be carried out quickly and improve facilities and infrastructure as well as adequate human resources. This is intended to minimize flood disaster management that often occurs in Sampang Regency.

Keywords: Flood disaster management, Accountability, Regional Disaster Management Agency

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
PERNYATAAN KEASLIAN.....	IV
MOTTO	V
HALAMAN PERSEMBAHAN	VI
ABSTRAK	VII
KATA PENGANTAR.....	XI
DAFTAR ISI.....	XIV
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Kegunaan Penelitian	8
1.4.1 Kegunaan Teoritis.....	8
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	9
1.5 Keaslian Penelitian	9
1.6 Metode Penelitian	13
1.6.1 Jenis Penelitian	13
1.6.2 Metode Pendekatan.....	13
1.6.3 Teknik Pengumpulan Data	14
1.6.4 Metode Analisis Data	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR.....	18
2.1 Teori Pertanggung Jawaban	18

2.1.1 Pengertian Pertanggung Jawaban.....	18
2.1.2 Indikator Pertanggung Jawaban.....	20
2.2 Konsep Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	21
2.2.1 Pengertian Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	21
2.2.2 Tugas Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah...	22
2.2.3 Tanggung Jawab dan Wewenang Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	23
2.3 Konsep Implementasi.....	25
2.3.1 Pengertian Implementasi.....	25
2.4 Pengertian Banjir.....	28
2.4.1 Jenis Banjir.....	29
2.4.2 Faktor Penyebab Banjir.....	30
BAB III PERTANGGUNG JAWABAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR	33
3.1 Implementasi Tugas dan Kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Sampang.....	33
3.1.1 Gambaran Objek Penelitian.....	33
a. Tingkat Kerawanan Banjir Secara Geografis.....	33
b. Tingkat Kerawanan Banjir Secara Administratif.....	35
c. Deskripsi Daerah Kali Kemuning.....	37
d. Kondisi Fisik Kabupaten Sampang.....	39
e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sampang.....	44
3.1.2 Implementasi Tugas Dan Kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Sampang.....	56
3.2 Pertanggung Jawaban Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Sampang.....	65

3.2.1 Pertanggung jawaban Pada Indikator Responsivitas.....	65
3.2.2 Pertanggung jawaban Pada Indikator Responsibilitas.....	73
BAB IV PENUTUP.....	82
4.1 Kesimpulan.....	82
4.2 Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	86

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Penulisan Sebelumnya	10
Tabel 3.1.1 Kondisi Administrasi Kecamatan di Kabupaten Sampang.....	39
Tabel 3.1.2 Daftar Sarana dan Pasarana.....	46
Tabel 3.1.3 Daftar Ketua.....	49
Tabel 3.1.4 Daftar Kesekretariatan.....	49
Tabel 3.1.5 Daftar Pencegahan dan Kesigapan (KP).....	50
Tabel 3.1.6 Daftar Kedaruratan dan Logistik (KL).....	50
Tabel 3.1.7 Daftar Rehabilitasi dan Rekontruksi (RR).....	51
Tabel 3.1.8 Daftar Tenaga dan Pengevakuasi Bencana.....	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1.1 Peta Risiko Banjir Kabupaten Sampang.....	34
Gambar 3.1.2 Peta Administrasi Kabupaten Sampang.....	35
Gambar 3.1.3 Kondisi Wilayah Sungai Kemuning.....	37
Gambar 3.1.4 Grafik Kejadian Bencana Alam 10 Tahun Terakhir di Kabupaten Sampang.....	44
Gambar 3.1.5 Kantor BPBD Kabupaten Sampang.....	45
Gambar 3.1.5 Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Sampang... ..	52
Gambar 1 Wawancara kepada bapak Asroni.....	89
Gambar 2 Wawancara kepada bapak Putut.....	89
Gambar 3 Wawancara kepada bapak Fadlillah.....	90
Gambar 4 Wawancara kepada bapak Juhri	90
Gambar 5 Wawancara kepada bapak Bachtiar.....	91